

BAB II

SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II

A. Biografi Singkat Sultan Mahmud Badaruddin II

Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II¹ merupakan salah satu Sultan yang memerintah di Kesultanan Palembang Darussalam. Ia merupakan anak dari Sultan Muhammad Bahaudin bin Susuhunan Ahmad Najamuddin (I) dan Ratu Agung Putri Datuk Murni binti Abdullah Alhadi, yang dilahirkan pada malam ahad 1 Rajab 1181 H/1767 M di Palembang. Sebagaimana biasanya seorang anak yang berasal dari keluarga bangsawan, SMB II memiliki nama kecil yaitu Raden Hasan. Ia dinobatkan menjadi Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam pada hari selasa 22 Zulhijjah 1218 H/1803 pada usia 37 tahun.²

Kakek SMB II adalah Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, sedangkan ayahnya Muhammad Bahaudin adalah pemimpin yang sangat taat terhadap ajaran agama Islam. Bahkan mereka berperan menyebarkan serta memajukan ajaran agama Islam ke seluruh pelosok wilayah Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahaudin, Islam mengalami banyak kemajuan. Tidak hanya bidang keagamaan yang mengalami kemajuan yang cukup berarti, namun terdapat juga bidang-bidang lain yang mengalami kemajuan di masa

¹ Sultan Mahmud Badaruddin II dalam penulisan selanjutnya hanya ditulis SMB II.

² H. A. Dahlan, dkk, *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, Palembang: TP, 1981, hlm. 44.

pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin, seperti bidang pelayaran, pertanian, perdagangan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan sekitar.³

Selain itu, Sultan Muhammad Bahauddin adalah seorang yang mempunyai minat yang tinggi terhadap perkembangan ajaran agama Islam. Semasa hidupnya, Sultan Muhammad Bahauddin tidak sempat menobatkan penggantinya, melainkan hanya mengangkat putera sulungnya Raden Hasan sebagai Pangeran Ratu (Putera Mahkota). Raden Hasan merupakan salah satu di antara putranya yang dikenal oleh masyarakat dan setelah menjadi sultan diberi gelar Sultan Mahmud Badaruddin II dan Raden Husin dengan gelar Sultan Najamuddin II.

Di dalam dunia pendidikan, semasa kecil SMB II mendapat pendidikan tentang kenegaraan dari ayah dan kakeknya, sementara pendidikan dalam ilmu agama ia dapat dari para ulama yang tinggal di lingkungan kraton Kesultanan Palembang Darussalam. Ulama-ulama tersebut antara lain Syekh Abdus Somad, Syekh Muhammad Muhyiddin bin Syihabuddin, Syekh Ahmad bin Abdullah, Syekh Kemas Muhammad bin Ahmad dan Sayid Abdurrahman al-Idrus.⁴ Namun, kondisi yang demikian tidak menjadikan dirinya jadi berkecil hati bahkan hal ini membuat SMB II kecil dapat dengan bebas bergaul dengan masyarakat biasa yang pada kemudian hari membentuk kepribadiannya. Meskipun ia hanya belajar dari

³M Chatib Quzwain, *Syaik Abdussomad Al-Palimbani: Studi Mengenal Islam di Palembang Abad 18*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 176.

⁴ Djohan Hanafiah, *Palembang Zaman Bari: Citra Palembang Tempo Doeloe*, Palembang: Humas Pemkot Palembang, 1988, hlm. 9.

ulama-ulama di sekitar kraton, tetapi ilmu yang didapat telah membuat ia menjadi seorang yang taat beragama dan patuh pada ajaran-ajaran agama Islam. Pada masa pemerintahan SMB II, Kesultanan Palembang Darussalam dicanangkan sebagai pusat studi Islam dan sastra, terutama setelah kemunduran kerajaan Aceh pada tahun 1750-1800. Pada masa SMB II, juga banyak muncul ulama ternama yang mengembangkan pemikiran Islam.⁵

Sikap kepribadian serta pergaulan dengan masyarakat di sekitar kraton telah memupuk dirinya untuk menjadi seorang pemuda yang tumbuh dengan pemikiran yang luas. Aspek pendidikan dan sepak terjang kakek dan ayahnya dalam memimpin kesultanan memberikan kesan yang sangat mendalam dan mendorong semangat dan jiwa besar SMB II muda. Ayahnya yang cinta akan kemerdekaan dan kegigihannya dalam mempertahankan kedaulatan Kesultanan Palembang Darussalam, selalu menjadi pandangan hidup SMB II dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Sejak muda SMB II sudah dikenal kalangan masyarakat sekitar kraton sebagai seorang bangsawan yang mempunyai kewibawaan besar dan juga rasa kemanusiaan luhur, serta terkenal sebagai anak raja yang cerdas, gagah berani dan bijaksana. Sifat-sifat pribadi ini sangat menonjol yang menyebabkan ia berbeda dengan saudara-saudaranya. Sebagai calon pemimpin, SMB II sudah mempunyai reputasi dan memperlihatkan kemampuan yang sangat mengagumkan. Hal ini bisa diketahui karena sebelum dinobatkan sebagai sultan, ia sudah menunjukkan kemampuannya

⁵ *Ibid*, hlm. 178.

dalam membantu ayahnya membangun benteng dan ikut menyusun strategi perang dengan menempatkan pasukan di tempat-tempat yang strategis.⁶

Salah satu faktor yang mempengaruhi pribadi SMB II adalah tradisi pemerintahan Sultan-sultan Palembang Darussalam terdahulu, khususnya sikap, tindakan dan cara kerja pendahulunya dalam mengelola negara. Tingkat kemajuan yang dicapai Kesultanan Palembang Darussalam sebelum pemerintahannya mendorong SMB II lebih berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negerinya. Bagi SMB II, sikap waspada terhadap musuh adalah suatu yang menjadi pedomannya.

Selain itu, sikap tidak mau tunduk terhadap musuh yakni Belanda dan Inggris menunjukkan bahwa SMB II dan perjuangannya disemangati oleh perasaan cinta kemerdekaan yang ingin lepas dari pengaruh kekuasaan bangsa asing. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usahanya melancarkan serangan terhadap Inggris dan Belanda yang ingin menguasai Palembang.

Sebagai seorang manusia yang taat beragama, SMB II juga melaksanakan perintah Rasulullah Muhammad S.A.W yakni menikah dan berkeluarga. Selama masa hidupnya, SMB II memiliki 9 orang istri yakni Embok Pati Rasmi, Ratu Sepuh Asma, Ratu Anom Kosimah, Nyayu Soleha, Nyimas Jairah, Nyayu Robi'ah, Masayu Ratu Ulu, Masayu Ratu Ilir serta Ratu Alit.⁷ Dari hasil pernikahannya dengan 9 orang istri, SMB II dikaruniai

⁶ Kiagus Imran Mahmud, *Sejarah Palembang*, Palembang: Angrek, 2010, hlm. 56.

⁷ Kratonpalembang.blogspot.com, diakses pada 8 November 2012, pukul 17.14 WIB.

61 anak. Dari sekian banyak anaknya, SMB II menjadikan anak pertama dari istri keduanya sebagai Putra Mahkota Kesultanan Palembang Darussalam, hal ini dikarenakan dari istri pertama SMB II mendapatkan seorang putri dan adat kesultanan tidak bisa mengangkat seorang putri menjadi putra mahkota.

SMB II juga dikenal sebagai ahli dalam diplomasi, strategi perang, serta terkenal sebagai sultan yang berwawasan luas dan suka belajar, sehingga dia mempunyai perpustakaan pribadi. SMB II mempunyai perhatian yang luas terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan khususnya bidang sastra, sebagai contoh dia mengubah pantun dan menulis syair Sinyaor Kista dan Syair Singor Nuri.⁸ Selain itu, SMB II juga mengarang Pantun Sultan Badaruddin dan Syair Perang Menteng, dimana pantun Sultan Badaruddin merupakan pantun yang ia sampaikan ketika akan menikahi puteri dari Kemas Muhammad, salah seorang kerabat kraton. Sedangkan syair perang menteng adalah sebuah syair yang ia sampaikan kepada para prajuritnya untuk memberi semangat dalam berperang melawan Belanda pada tahun 1819.⁹

SMB II adalah pemimpin yang memerintah secara bijaksana, memiliki kepribadian yang kuat serta berbakat dalam mengelola wilayah kesultanan. SMB II sangat menonjol perannya dalam konfrontasi melawan kaum

⁸ Woekder, M.O, *Het Sultanat Palembang 1811-1825*, Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1975, hlm. 3.

⁹ Kiagus Imran Mahmud, *Op. cit*, hlm. 55.

imperialis Inggris dan Belanda, sehingga hampir seluruh masa pemerintahannya disibukkan dengan konfrontasi dan peperangan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya merancang dan membangun benteng pertahanan dan mengatur strategi dalam menghadapi serangan dari Inggris dan Belanda.¹⁰

Kepribadian seorang SMB II sebagai seorang sultan juga sangat dikagumi oleh Mayor Robinson, seorang residen Inggris di Bangka pengganti residen Mears yang menjabat pada tahun 1813.¹¹ Rasa kagum Robinson lebih dilatarbelakangi dari kewibawaan sikap dan sifat SMB II terhadap rakyatnya. Serta lebih berwibawa dibandingkan adiknya yaitu Sultan Najamuddin II. Ketika Robinson menjabat sebagai seorang residen di Bangka, berulang kali Robinson mengunjungi ibukota Kesultanan Palembang Darussalam guna memastikan keadaan di wilayah ibukota kondusif. Tindakan ini dilakukan Robinson atas perintah Raffles serta untuk menjamin keberadaan Sultan Najamuddin II yang sedang berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam dari serangan saudaranya, yakni SMB II.

B. Situasi Kesultanan Palembang Darussalam 1803-1819

Kurun waktu enam belas tahun (1803-1819) menjelang pecahnya Perang Palembang dengan Belanda akan direkonstruksi pada bagian ini untuk

¹⁰ Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, Jakarta: Haji Masagung, 1989, hlm. 34.

¹¹ *Ibid*, hlm. 66.

menunjukkan tingkat kematangan situasi dan kondisi atas pecahnya perang tersebut di tahun 1819. Situasi dan kondisi selama enam belas tahun relatif panjang untuk dipelajari. Seringkali timbul kesulitan dalam mengkaji sejarah karena dimensi waktu dan ruang lingkup yang tidak terbatas.

SMB II menjadi sultan di Kesultanan Palembang Darussalam sejak 1803. Mengingat perang Palembang itu merupakan bagian dari perjuangan dan perlawanan rakyat kesultanan Palembang dalam menghadapi penjajahan Belanda, sehingga terdapat beberapa aspek yang mendukung dalam mengkaji situasi Palembang itu sendiri baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan.

1. Situasi Ekonomi dan Sosial

Perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam dapat dilihat dari letak kesultanan ini berada, dimana perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh perdagangan dari dalam dan luar negeri. Hubungan perdagangan dilakukan dengan berbagai kerajaan yang ada di Jawa, Riau, Malaka, Siam, China dan pedagang-pedagang Eropa. Komoditi utama yang menjadi andalan Kesultanan Palembang Darussalam adalah beras, lada, getah, kayu dan timah.¹² Selain itu, perdagangan yang terjadi di dalam negeri Kesultanan Palembang Darussalam adalah perdagangan yang terjadi antara pedagang-pedagang lokal atau penduduk pribumi.

¹² Harun Yahya, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995, hlm. 47.

Para pedagang ini kebanyakan berasal dari daerah hulu atau pedalaman yang datang ke Palembang untuk melakukan transaksi perdagangan dengan penduduk kota atau dengan para pendatang yang membutuhkan berbagai dagangan dari Palembang. Pedagang-pedagang ini membawa hasil bumi berupa beras, rempah-rempah, getah, kayu dan kayu pewarna.

Pada masa pemerintahan SMB II, pedagang-pedagang dari luar negeri atau pedagang asing banyak yang datang ke Palembang, pada umumnya datang untuk membeli rempah-rempah dan getah kayu untuk pengharum ruangan. Para pedagang yang membeli rempah-rempah dari Palembang kebanyakan adalah pedagang yang datang dari Kesultanan Riau. Riau yang pada waktu itu dibawah pemerintahan Raja Haji telah mengambil alih peran Malaka dalam jalur perdagangan internasional. Kesultanan Riau adalah jalur perdagangan yang sangat penting bagi Kesultanan Palembang Darussalam dalam penjualan lada, terutama ketika Malaka sudah diduduki oleh kaum Portugis. Baik pemerintah Kesultanan Palembang Darussalam maupun pemerintah Kesultanan Riau menyediakan bantuan kapal bagi pedagang untuk mengangkut lada dari Palembang menuju Riau, begitu juga sebaliknya.¹³

Selain dari Riau, pada pedagang ada juga yang berasal dari Arab dan Cina, mereka biasanya dalam melakukan transaksi perdagangan dengan penduduk tidak hanya dalam satu hari saja. Transaksi perdagangan yang

¹³ Kiagus Imran Mahmud, *Op. cit*, hlm. 57.

mereka lakukan bisa berbulan-bulan dengan penduduk lokal, hal ini dikarenakan mereka menyesuaikan dengan arah angin jikalau ingin pulang ke negeri mereka. Akibat hal ini, kebanyakan para pedagang membuat kampung-kampung tersendiri di wilayah kesultanan. Orang-orang Palembang dan Arab tinggal di daratan dengan rumah-rumah dari kayu, sementara di atas air mengapung rumah-rumah rakit tempat tinggal orang Tionghoa.¹⁴

Ramainya perdagangan rempah-rempah di ibukota Palembang tidak terlepas dari adanya kemampuan alam di Kesultanan Palembang Darussalam dalam menghasilkan rempah-rempah dalam jumlah yang banyak. Kesultanan Palembang Darussalam dalam setahun mampu menghasilkan 25.000 hingga 30.000 pikul rempah-rempah yang diperoleh dari hasil bumi di daerah pedalaman.¹⁵ Menyadari pentingnya rempah-rempah dalam perekonomian internasional, maka Kesultanan Palembang Darussalam terus berusaha meningkatkan hasil produksinya dengan memerintahkan masyarakat pedalaman untuk membuka lahan baru untuk menanam rempah-rempah. Kesultanan juga menjamin keamanan di jalur

¹⁴ Dedy Irwanto, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial*, Yogyakarta: Ombak, 2011, hlm. 2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 94.

pelayaran menuju pedalaman untuk menjaga lancarnya pasokan rempah-rempah dari pedalaman.¹⁶

Perdagangan di Kesultanan Palembang Darussalam bertambah ramai ketika ditemukannya timah di Pulau Bangka dan Belitung. Kepulauan Bangka kemudian menjadi pemasok timah terbesar di Asia saat itu. Produksi timah kepulauan Bangka dalam setahun mencapai 20.000 pikul. Produksi timah sebanyak ini telah menjadikan Kesultanan Palembang Darussalam berlimpah dengan kekayaan. Banyak pedagang yang datang untuk membeli timah, pedagang-pedagang itu berasal dari Arab, Cina dan daratan Eropa terutama Inggris dan Belanda yang bersaing mendapatkan hak monopoli di Palembang.¹⁷

Mata uang yang berlaku dan diperbolehkan di Kesultanan Palembang Darussalam serta dapat diterima oleh sultan adalah dollar Spanyol.¹⁸ Sementara dalam sirkulasi umum yang berlaku di masyarakat, berlaku jenis koin yang kecil dan dikeluarkan oleh pihak kesultanan yang dinamakan *pitis*.¹⁹ Mata uang jenis koin ini terbuat dari lembaran timah yang dipotong seta ada lubang persegi di tengah.

Iklim sosial di Kesultanan Palembang Darussalam dikuasai oleh Sultan dan kraton sebagai pusat pemerintahan. Dalam struktur ini, kaum

¹⁶ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁷ Djohan Hanafiah. *Palembang Zaman Bari: Citra Palembang Tempo Doeloe, Op.cit.*, hlm. 45.

¹⁸ Marsden. William. *History of Sumatra (Sejarah Sumatra)*. Bandung: Rosdakarya, 1999, hlm. 361

¹⁹ *Ibid*.

ningrat menempati tata urutan sosial yang paling tinggi. Di dalam lingkungan kraton, lapisan atas disebut dengan golongan priyayi, yang terdiri dari keturunan Sultan dengan gelar Raden atau Pangeran. Di bawahnya terdapat kaum mantri dan masyarakat umum menempati lapisan sosial paling bawah dari struktur sosial di Kesultanan Palembang Darussalam.

Sebagai penyeimbang politik kaum ningrat, Kesultanan Palembang Darussalam menciptakan jabatan bangsawan sendiri, yang secara kolektif dikenal dengan sebutan mantri. Golongan ini dapat diangkat orang dari semua lapisan masyarakat sesuai dengan keinginan Sultan, dengan satu-satunya syarat bahwa menjadi mantri haruslah orang yang beragama Islam. Selain orang Palembang, banyak sekali keturunan Arab dan China yang diangkat menjadi mantri.²⁰ Nasib mantri tergantung pada kebaikan Sultan sebagai pelindungnya. Golongan mantri didasarkan kepada status ibu mereka.

Dalam hierarki sosial, tempat pertama diduduki oleh bangsawan dari pernikahan antara laki-laki priyayi dengan wanita golongan mantri. Keturunan mereka menyandang gelar *masagus* untuk laki-laki sementara untuk perempuan bergelar *masayu*. Meskipun para *masagus* dan *masayu* berasal dari golongan priyayi, status mereka masih tetap di bawah raden dan dalam pergaulan sehari-hari status mereka lebih mendekati mantri. Di bawah *masagus* terdapat lapisan bangsawan bergelar *kemas* dan *nyimas*

²⁰ Peters, Jeroen, *Kaum Tuo-Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta: INIS, 1997, hlm. 8.

yang berasal dari pernikahan kedua pasangan dari golongan mantri. Lapisan terendah di golongan bangsawan adalah *kiagus* dan *Nyayu*, yang berasal dari pernikahan golongan *kemas* dengan wanita rakyat biasa.²¹

Para pedagang dari Arab dan Cina yang bertempat tinggal di kota Palembang termasuk dalam stratifikasi sosial di kota tersebut. Mereka dengan cara masing-masing berusaha menjalin kerjasama dengan pihak kesultanan. Orang-orang Cina datang ke Palembang sekitar abad ke 16 dan kota Palembang sendiri merupakan salah satu daerah peranakan Cina tertua di Asia Tenggara. Orang-orang Cina menjadi mitra dagang sultan dan sebagian mengambil peran sebagai perantara memenuhi permintaan akan kebutuhan barang impor. Kebanyakan orang-orang Cina sudah berintegrasi ke dalam masyarakat setempat dengan cara pindah agama atau menikah dengan penduduk asli. Bahkan sebagian perempuan dalam lingkaran kraton adalah keturunan Cina, yaitu ketiga istri dari sultan Mahmud Badaruddin I masih berdarah Cina.²²

Orang-orang Arab melakukan kegiatan yang hampir sama dengan orang Cina yaitu berdagang, namun mereka mendominasi perdagangan kain dan tekstil serta sebagai pemilik kapal dagang. Kesamaan di bidang agama di samping pengetahuan dan keterampilan baca tulis agama dan tradisi Islam dengan para penduduk asli Palembang membuat kedudukan mereka

²¹ Kiagus Imran Mahmud, *Op. cit*, hlm. 98.

²² Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi: Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003, hlm. 38.

agak berbeda dibanding orang Cina. Kaum arab kebanyakan berperan sebagai ulama ataupun sebagai penulis sastra, dimana orang-orang Arab dianggap sebagai cikal bakal kelompok literati yaitu kelompok kaum terpelajar yang bekerja untuk kesultanan.²³ Namun, pengaruh dan peran yang dimainkan orang-orang Arab terkadang memunculkan sejumlah ketegangan. Hal ini bisa dilihat dari adanya anggapan dari sebagian kaum Arab yang berdomisili di Palembang yang menganggap masyarakat Palembang umumnya tidak taat dalam menjalankan perintah agama Islam.

Sementara kehidupan sosial para pedagang dari Eropa yang kebanyakan merupakan pegawai VOC, berbeda dengan pedagang dari Arab dan Cina. Mereka memiliki hubungan sosial yang terbatas dengan sistem Kesultanan Palembang Darussalam. Kaum Eropa pada umumnya menjalankan peranan sebagai penyalur komoditas lokal (seperti lada dan timah) dan hasil kerajinan Palembang serta memasok barang-barang impor seperti benang sutera dan bahan kain dari India.²⁴ Kegiatan dagang VOC semasa pemerintahan SMB II hanya terbatas di kota Palembang saja dan tidak masuk sampai ke daerah pedalaman. Sumber daya alam negeri tetap dikuasai dan berada di bawah kendali Kesultanan Palembang Darussalam baik sultan maupun pembesar-pembesar kerajaan.

Sedangkan kehidupan sosial rakyat yang khusus tinggal di Kota Palembang disebut dengan miji, yaitu orang biasa yang kedudukannya sama

²³ *Ibid*, hlm. 39.

²⁴ *Ibid*, hlm. 40.

dengan mata gawe di pedalaman.²⁵ Sebagian besar miji adalah orang-orang yang bekerja dan tunduk di bawah kekuasaan bangsawan dan pembesar di kesultanan. Mereka umumnya hidup dalam satu lingkungan di bawah pengawasan bangsawan tertentu. Namun, kelompok miji memiliki kekuatan memilih untuk menolak atau berpindah kerja pada induk semang yang lain.²⁶

2. Situasi Politik dan Keamanan

Sistem dan struktur pemerintahan di Kesultanan Palembang Darussalam berada langsung di bawah kendali Sultan. Adapun pelaksana hariannya dijalankan oleh Putera Mahkota (Pangeran Ratu) yang dibantu oleh empat pembesar negara (Mancanegara)²⁷ yang merupakan bagian dari Pancalang Lima. Pancalang lima merupakan gabungan mancanegara dan sultan. Pola pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam lebih cenderung mengikuti pola Kerajaan Majapahit yang telah diberi corak agama Islam. Susunannya yaitu Sultan, Adipati, Patih, Penghulu dan

²⁵ Mata gawe merupakan sebutan untuk rakyat biasa yang tinggal di pedalaman Palembang, biasanya mereka tinggal di tanah-tanah milik keluarga sultan dan bekerja bagi keluarga tersebut. Hak dan kewajibannya dilindungi oleh pihak kesultanan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 42.

²⁷ Mancanegara berarti pembesar-pembesar kerajaan. Sedangkan dalam istilah yang digunakan dalam Kerajaan Mataram, mancanegara berarti wilayah yang berada di luar negara Agung. (Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*, Jakarta: Depdikbud, 1975, hlm. 2.

Hakim.²⁸ Karena Kesultanan Palembang Darussalam merupakan negara yang memiliki banyak pelabuhan, maka jabatan Hakim diganti dengan Syahbandar.

Adapun mancanegara terdiri atas Patih dengan gelar Pangeran Natadipraja yang memegang seluruh urusan kerajaan baik di ibukota maupun di pedalaman. Kedua yaitu Adipati, dengan gelar Pangeran Citra yang memimpin kelompok tentara atau hulubalang. Kemudian Penghulu yang bergelar Pangeran Natagama yang menjadi kepala alim ulama yang mengurus seluruh persoalan keagamaan di wilayah kesultanan. Dan yang terakhir Syahbandar, yang menangani semua urusan pelabuhan dan perdagangan.²⁹

Secara struktural, masing-masing jabatan mancanegara mempunyai pegawai-pegawai tersendiri yang terdiri dari:³⁰

- a. Pegawai-pegawai tinggi (yang dijabat oleh para kaum priyayi) dan mantri-mantri sebagai pegawai rendahan (diberi gelar tumenggung, ranga, demang, dan ngabehi).

²⁸Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: Logos, 1998, hlm. 67.

²⁹ Roo de la Faile, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, Jakarta: Bharata, 1971, hlm. 34-35.

³⁰ Ahmad Isnadi, *Perang Kesultanan Palembang Darussalam menghadapi Kolonial Abad XIX (Kajian Keterlibatan Tarekat Sammaniyah)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006, hlm. 35.

- b. Para Hulubalang dan Laskar kesultanan dengan berbagai tingkatan pangkat yang berada di bawah komando Adipati.
- c. Pejabat-pejabat Agama yang di pimpin Pangeran Natagama baik di ibukota maupun di pedalaman. Pejabat ini terdiri dari Khatib penghulu, Khatib Imam dan modin.
- d. Pejabat dan pegawai-pegawai di pelabuhan yang dikepalai oleh seorang Syahbandar.

Pada akhir abad ke-18, iklim politik di kawasan benua Eropa mulai memanas dengan dikuasainya negeri Belanda oleh Pasukan Napoleon Bonaparte dari Perancis. Inggris yang menjadi tempat pelarian raja Belanda dipercaya untuk mengambil alih kekuasaan Belanda di Hindia Belanda. Pada tanggal 4 Agustus 1811, pasukan Inggris menyerang pasukan Perancis yang ada di Batavia dan baru pada 26 Agustus 1811 Batavia dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris.³¹

Peperangan ini berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811.³² Disebut dengan perjanjian Tuntang, karena perjanjian ini diadakan di daerah Tuntang, suatu daerah yang terletak

³¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Yogyakarta: Serambi, 2010, hlm. 391.

³² Suyono, *Peperangan Kerajaan di Nusantara*. Jakarta: Grasindo. 2004, hlm. 126.

di utara Salatiga. Daerah Tuntang merupakan lokasi menyerahnya pasukan Jansens akibat serangan dari pasukan Raffles. Perjanjian ini berisi tentang kesepakatan damai dan penyerahan daerah kekuasaan Belanda yang meliputi Jawa, Timor, Makassar, Palembang serta daerah-daerah taklukannya menjadi daerah kekuasaan Inggris.³³

Situasi politik yang melanda Benua Eropa berimbas juga terhadap Kesultanan Palembang Darussalam, sebagai salah satu daerah yang mendapat pengaruh dari Belanda, Kesultanan Palembang Darussalam harus mengakui perjanjian Tuntang yang telah disepakati oleh Belanda dan Inggris. Perjanjian antara Inggris dan Belanda menimbulkan harapan baru bagi Sultan Palembang untuk melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Belanda. Momentum tersebut bersamaan dengan adanya diplomasi Inggris yang mengajak SMB II untuk menghadapi Belanda. Diplomasi Inggris tersebut mendapat sambutan yang baik dari sultan. Pada tanggal 14 September 1811, sultan mengusir dan menghancurkan loji Belanda di Sungai Aur.³⁴

Peristiwa penghancuran loji milik Belanda di sungai Aur dikenal dengan peristiwa Loji sungai Aur. Peristiwa ini sendiri merupakan sebuah usaha yang dilakukan pihak Kesultanan Palembang Darussalam di bawah komando SMB II untuk mengusir orang-orang Belanda yang masih bertahan

³³ Kiagus Imran Mahmud, *Sejarah Palembang*, Palembang: Anggrek, 2010, hlm. 51.

³⁴ Profil Provinsi RI: Sumatera Selatan, Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992, hlm. 102.

di wilayah kesultanan. Mengingat bahwa kondisi orang-orang Belanda di pulau Jawa yang telah terdesak oleh pasukan Inggris, maka SMB II melihat momentum ini untuk melepaskan diri dari pengaruh Belanda. Pada tanggal 14 September 1811, SMB II mengirimkan utusan yang bernama Ki Tumenggung Lanang untuk menemui residen di loji, yaitu Jacob Groenhoof van Woortman³⁵.

Utusan SMB II menyampaikan kepada residen bahwa Batavia telah jatuh ketangan Inggris, untuk itu diharapkan residen beserta pasukannya segera meninggalkan wilayah kesultanan Palembang Darussalam. Pesan ini ditolak oleh residen van Woortman dengan alasan bahwa mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan Batavia serta tidak ada perintah untuk meninggalkan loji oleh Gubernur Jendral. Penolakan ini tidak membuat SMB II membatalkan niatnya untuk mengusir orang-orang Belanda dari wilayah kesultannya. Dengan paksaan, sebanyak 87 orang Belanda yang berada di loji dibawa ke atas kapal guna dibawa ke Batavia.

Setiba di kapal, para prajurit Belanda mengadakan perlawanan terhadap pasukan kesultanan yang berjaga di kapal. Karena hal ini, seluruh orang Belanda di bunuh di atas kapal dan kapalnya ditenggelamkan di sungai. Peristiwa pembunuhan di atas kapal ini dikenal luas dengan *Palembang Massacre* oleh orang-orang Eropa. Setelah menenggelamkan kapal yang ditumpangi oleh pasukan Belanda, SMB II memerintahkan pasukannya untuk membakar habis loji milik Belanda. Perintah ini

³⁵ Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan, Op.cit.*, hlm. 52.

dikeluarkan oleh SMB II untuk menghapus semua monumen peninggalan Belanda di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam.

Berdasarkan perjanjian Tuntang, Belanda menyerahkan kekuasaannya di Palembang kepada Inggris. Dalam melaksanakan perjanjian tersebut, Inggris mengirimkan utusan untuk menerima warisan daerah Palembang dari Belanda. Kedatangan utusan Inggris ditolak oleh SMB II, karena Palembang empat hari sebelum perjanjian Tuntang ditandatangani sudah tidak berada dalam kekuasaan Belanda akan tetapi telah merdeka. Akibat tindakan SMB II, maka pada 20 Maret 1812 Raffles selaku Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi ke Palembang di bawah pimpinan Jenderal Mayor Robert Rollo Gillespie untuk menaklukan Palembang. Kedatangan Gillespie ini juga bertujuan untuk menghukum SMB II atas peristiwa loji sungai Aur dan *Palembang Massacre*. Pada 24 April 1812, Kesultanan Palembang Darussalam dapat dikuasai oleh pasukan Inggris.³⁶

Kekalahan SMB II dalam menghadapi pasukan Inggris di Benteng Pulau Borang tidak menyurutkan niatnya untuk mengusir penjajah dari wilayah Palembang. Dalam melancarkan perlawanannya, SMB II lebih mengkonsentrasikan kekuatannya di daerah pedalaman (uluhan) Palembang. Hijrahnya SMB II ke daerah pedalaman menyebabkan kekosongan politik pemerintahan di ibukota Palembang, untuk menghadapi hal tersebut pemerintah Inggris mengangkat saudara SMB II yaitu Pangeran Adipati atau

³⁶ *Ibid*, hlm. 65.

Raden Husin sebagai sultan yang berkuasa di Palembang pada 14 Mei 1812 dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II.³⁷

Pemerintah Kolonial Inggris berkuasa di kepulauan Nusantara tidak lebih dari satu dekade. Setelah Napoleon Bonaparte berhasil dikalahkan dalam pertempuran di Leipzig dan kemudian tertangkap, maka pada tahun 1814 melalui Konvensi London,³⁸ Inggris mengembalikan semua daerah kekuasaan Belanda yang pernah dikuasai Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, pemerintah Kolonial Belanda menerima kembali daerah-daerah jajahan di Nusantara yang dikuasai Inggris sejak 1811 atau sejak perjanjian Tuntang.³⁹

Setelah Konvensi London 1814, serah terima daerah jajahan dilakukan antara pihak Inggris dan Belanda dimana Inggris diwakilkan oleh M.H. Court dan dari pihak Belanda di wakili oleh K. Heynes di Mentok, Bangka, pada 10 Desember 1816.⁴⁰ Langkah lanjutan yang dilakukan oleh Belanda adalah mengangkat Klass Hejnis sebagai residen Belanda untuk Palembang

³⁷ Pemerintah Provinsi Daerah TK I Sumatera Selatan, *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, Palembang: Siguntang Mahameru, 1984, hlm. 22.

³⁸ Konvensi London atau Perjanjian London (1814), yang isinya antara lain menyepakati bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda, kecuali daerah Bangka, Belitung dan Bengkulu yang diterima Inggris dari Sultan Najamuddin. Penyerahan daerah kekuasaan di antara kedua negeri itu dilaksanakan pada tahun 1816.

³⁹ Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, *Op. cit.*, hlm. 76.

⁴⁰ H.A. Dahlan. dkk. (1981). *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*. Palembang: TP, hlm. 24.

dan Bangka pada November 1816. Sekembalinya ke Palembang setelah proses serah terima selesai dilakukan, Hejnis terkejut mendapati adanya dualisme kekuasaan di Kesultanan Palembang Darussalam. Dimana di satu pihak ada Sultan Ahmad Najamuddin dan di pihak lain ada Sultan Mahmud Badaruddin II yang berkuasa di pedalaman.

Salah satu tugas Heynes adalah meredakan ketegangan antara kedua sultan yang selalu bertikai. Akan tetapi usahanya belum menampakkan hasil, karena ia segera digantikan oleh Dewan Keuangan yang terdiri dari N. Coop-a-Groen dan J. Du Puy pada 13 Juni 1817.⁴¹ Empat bulan kemudian Dewan Keuangan digantikan oleh Muntinghe (ketua Dewan Keuangan dengan jabatan Komisaris di Palembang) dan ia melakukan pengambilalihan kekuasaan di Muntok pada 20 April 1818.⁴² Tugas Muntinghe adalah mengukuhkan kekuasaan Belanda atas Palembang dan Bangka sekaligus mencegah perpecahan lebih lanjut antara Najamuddin II dengan Badaruddin II dengan cara membagi kekuasaan di antara mereka.

Walaupun secara resmi kekuasaan berada di tangan Najamuddin II untuk seluruh wilayah Kesultanan Palembang Darussalam dan berkedudukan di ibukota, tetapi kenyataannya ia hanya memiliki kekuasaan yang kecil, dan tidak memiliki kemampuan sekaligus sarana yang dapat menunjang kelancaran pemerintahannya. Berbanding terbalik dengan

⁴¹ *Ibid*, hal. 25.

⁴² *Ibid*, hal. 26.

saudaranya, Badaruddin II yang memiliki kekuasaan lebih besar disertai dengan kelihaiannya dalam memimpin Kesultanan tersebut.⁴³

Setibanya Muntinghe di Palembang pada bulan Juni 1818, ia menyodorkan perjanjian yang harus ditandatangani oleh kedua sultan tersebut, yang intinya bahwa “sebagian besar wilayah kesultanan Palembang Darussalam diserahkan kepada Belanda” (wilayah pesisir dan pedalaman), sedangkan mereka hanya memperoleh sebagian kecil wilayah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Badaruddin II menandatangani perjanjian tersebut pada 21 Juni 1818. Najamuddin II menolak, karena ia harus membagi kekuasaan dengan Badaruddin II (disebut sultan tua dan Najamuddin II disebut sultan Muda), sekaligus kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaan. Akhirnya dengan paksaan Najamuddin II menerima dua hari berikutnya.⁴⁴

Muntinghe mengetahui bahwa sultan Najamuddin II diangkat oleh pihak Inggris. Karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi di kesultanan Palembang Darussalam, maka Muntinghe seizin dari Gubernur Jenderal di Batavia menurunkan paksa Sultan Najamuddin II dan mengakui sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan yang sah di Kesultanan Palembang Darussalam.

⁴³ ANRI, Bundel Palembang No 70.3, *Memorie van den herr H.W. Muntinghe over het Bestuur van Palembang 16 Februarie 1827.*

⁴⁴ Djohan Hanafiah, *Op.cit.*, hlm. 89.

Sultan Najamuddin II tidak senang diperlakukan seperti ini dan ia juga mengetahui kebencian pihak Inggris kepada pihak Belanda, kemudian ia meminta bantuan kepada Raffles yang masih berkuasa di Bengkulu. Raffles menanggapi permintaan sultan Najamuddin II dengan mengirimkan pasukan ke Kraton Kuto Lamo, tempat sultan Najamuddin II bertahta dan menaikkan bendera *Union Jack*.

Peristiwa ini membuat gempar pihak Belanda, lalu Kraton Kuto Lamo dikepung dan seluruh pasukan Inggris ditangkap dan dibuang ke Batavia. Atas peristiwa ini, Muntinghe menuduh Sultan Najamuddin II berkhianat kepada Ratu Belanda dan pada tanggal 30 Oktober 1818, Sultan Najamuddin II beserta keluarga besarnya dibuang ke Cianjur.⁴⁵ Tindakan yang dilakukan Muntinghe ini membuat Sultan Mahmud Badaruddin II sangat kecewa. Dengan demikian ia mengirim utusan ke daerah-daerah pedalaman agar rakyat lebih meningkatkan kesiagaan untuk mengadakan perlawanan bergerilya ketika saatnya tiba.

C. Kondisi Masyarakat Sebelum Perang 1819

Masyarakat Kesultanan Palembang Darussalam terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, terutama yang terletak di daerah pedalaman kesultanan. Tetapi pada umumnya para penduduk kesultanan masih memiliki kebudayaan sendiri, mulai dari bahasa maupun adat-istiadat. Meskipun terdiri dari berbagai suku dan bahasa yang ada di pedalaman,

⁴⁵ H.A. Dahlan. dkk. *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*. Palembang: TP, 1981, hlm. 26.

namun penduduk di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam masih dapat berkomunikasi dengan baik berkat adanya bahasa perantara yang dikenal dengan bahasa Melayu-Palembang. Bahasa ini pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam merupakan bahasa di luar elite kraton, karena kraton Palembang Darussalam mempergunakan semacam bahasa Jawa Kromo.⁴⁶

Hak pemakaian tanah diserahkan kepada marga dengan menghormati batas-batas antara marga itu sendiri yang ditetapkan oleh Sultan. Keputusan hukum terletak di tangan sultan atau pembesar-pembesar kerajaan. Dalam penyelesaian masalah, sultan bertindak sebagai penengah dan berhak menerima jasa dari penduduk. Hasil jasa ini dipergunakan sebagai sumber pendapatan lain untuk membiayai kraton.

Sementara hasil bumi terutama padi dikumpulkan di rumah-rumah penduduk atau di gudang-gudang untuk digunakan sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi perang dengan pasukan musuh. SMB II juga menghimpun kekuatan dari penduduk yang sifatnya sukarela, sehingga menjadi kekuatan yang tidak mudah dihasut oleh pihak Belanda maupun Inggris. Secara geografis, wilayah di kesultanan Palembang Darussalam terbagi atas daerah rawah-rawa, pematang dan talang. Masyarakat yang terletak di daerah Iliran sungai Musi lebih memanfaatkan produktivitas

⁴⁶ Djohan Hanafiah, *Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan Dalam Kehidupan Masyarakat Pendukungnya* dalam buku *Kongres Kebudayaan 1991: Kebudayaan Nasional, Kini dan di Masa Depan*, DEPDIKBUD: Jakarta, 1992, hlm. 132.

tanahnya dengan tanah lebak dan ditanami padi. Sementara masyarakat pedalaman biasanya memanfaatkan tanahnya dengan cara menanam karet.

Hukum adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Simbur Cahaya. Undang-undang ini mengatur aspek-aspek budaya dan pergaulan masyarakat yang berada dalam kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam. Undang-undang Simbur Cahaya ini dibuat oleh Sultan Abdulrahman yang berfungsi untuk menyatukan masyarakat Kesultanan Palembang Darussalam ke dalam norma-norma Islam.⁴⁷

Masyarakat yang berdiam diri di ibukota Palembang pada umumnya menyebut mereka dengan “*wong Palembang*”, sedangkan masyarakat kesultanan yang berdiam diri di luar ibukota Palembang biasa dipanggil dengan sebutan “*uluan*” atau “*iliran*”.⁴⁸ Istilah penyebutan “*iliran*” dan “*uluan*” mengacu kepada asal penduduk di ibukota Palembang.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 129.

⁴⁸ Dedi Irwanto, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial*, Yogyakarta: Ombak, 2011, hlm. 91.